

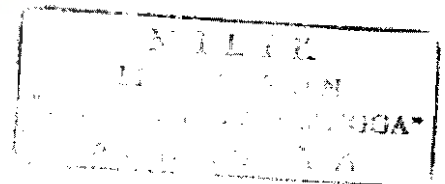
SKRIPSI

RUSDIANTO UMAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP
PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)
DI PASAR MODAL**



KIK.
Dag 431/97
Uma
P.



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP
PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)
DI PASAR MODAL**

SKRIPSI


**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

Penyusun,



Rusdianto Umar

NIP. 130.657.517

NIM. 039313787

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1997

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Januari 1997

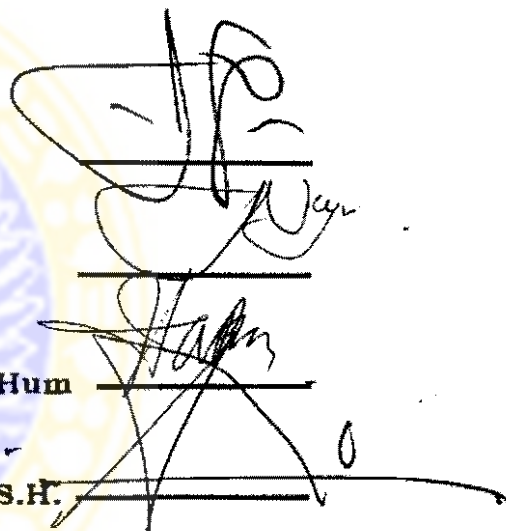
Tim Penguji :

1. Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Sekretaris : Hj. Nurwahjuni, S.H., C.N.

3. Anggota : Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum

H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



Handwritten signatures of the examiners over horizontal lines.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya telah mewajibkan kepada Emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan, baik selama proses emisi efek maupun sesudah proses emisi efek. Kewajiban keterbukaan ini diwujudkan dalam bentuk prospektus dan pelaporan-pelaporan yang bersifat berkala ataupun yang bersifat insidentil, menyangkut informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa Efek dan keputusan investasi para pemodal.
- b) Untuk melindungi investor dari tindakan-tindakan *insider trading*, Undang Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur sarana perlindungan hukum, diantaranya melalui sistem pengawasan atas perdagangan efek yang dilakukan oleh Bapepam dan Bursa Efek. Disamping itu, Undang Undang Pasar Modal juga telah menetapkan sanksi-sanksi hukum yang bersifat represif, yang meliputi : sanksi administratif sebagaimana diatur di

dalam pasal 102; sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal 104; serta sanksi perdata berdasarkan pasal 111 Undang Undang Pasar Modal dan pasal 1365 KUHPperdata. Dengan demikian, perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar investor merasa aman menginvestasikan dananya di pasar modal.

2. Saran

- a) Bapepam hendaknya lebih aktif meminta keterangan dan sekaligus meneliti setiap kebenaran dokumen-dokumen laporan yang dikirimkan oleh Emiten, sehingga prinsip keterbukaan betul betul diwujudkan.
- b) Perlunya penuntasan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*) menurut Undang-undang Pasar Modal, terutama menyangkut pelaksanaan pasal 99 U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.